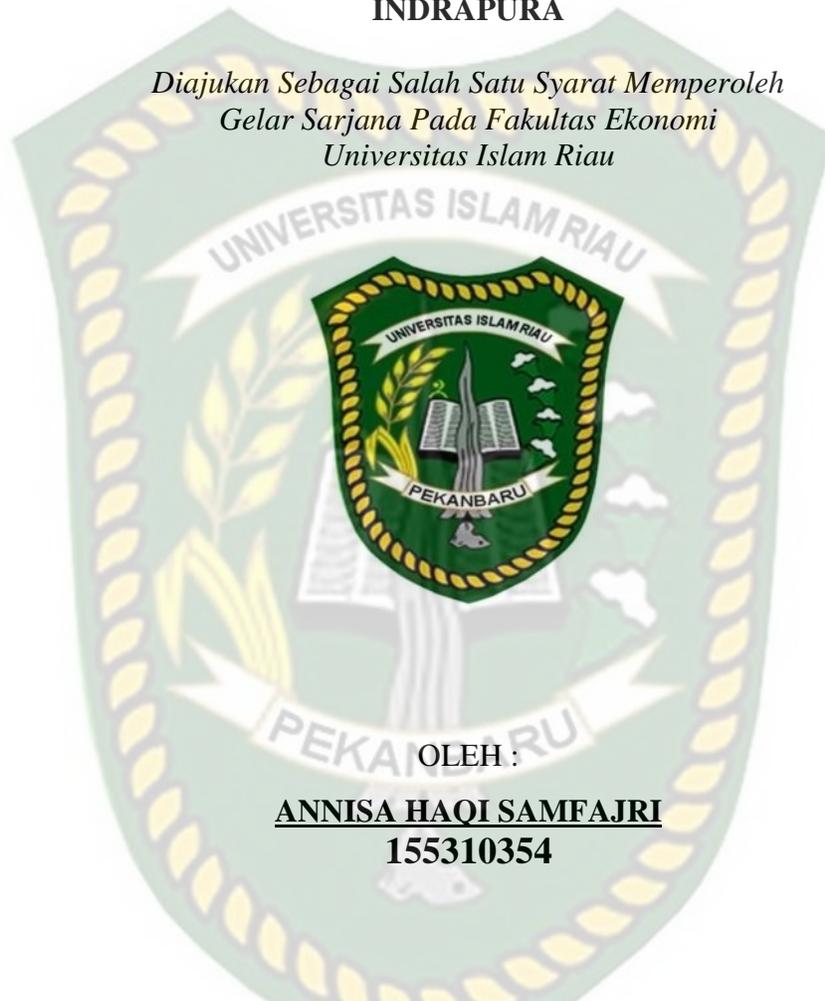


SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA
BUANTAN BESAR KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK SRI
INDRAPURA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau*



OLEH :

ANNISA HAQI SAMFAJRI
155310354

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANNISA HAQI SAMFAJRI
NPM : 155310354
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI-S1
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Buantan
Besra Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura

Disahkan Oleh:

Pembimbing I

Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA

Mengetahui :

Dekan

Ketua Prodi Akuntansi S1

Drs. H. Abrar, M.Si.,AK.,CA

Dra. Eny. Wahyuningsih, M.Si.,AK.,CA

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA BUANTAN BESAR KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA

OLEH :

ANNISA HAQI SAMFAJRI

Penelitian ini dilakukan pada Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Indrapura, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa Buntan Besar dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari wawancara langsung dengan bendahara Desa Buntan Besar mengenai proses penyusunan laporan keuangan desa dan sejarah berdirinya desa. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Desa Buntan Besar. misalnya buku catatan dan laporan keuangan desa, serta visi misi desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode survey, yaitu dengan cara wawancara dan observasi langsung. Analisis penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif dengan metode kualitatif.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Keuangan pada Pemerintahan Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Kata Kunci : Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan
Desa.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF FINANCIAL ACCOUNTING IN BUANTAN BESAR VILLAGE OF SIAK SUBDISTRICT, SIAK SRI INDRAPURA REGENCY

BY:

ANNISA HAQI SAMFAJRI

This research was conducted in the village of Great Buntan Subdistrict Siak Siak Indrapura, which aims to determine how well suited the application of accounting at the Village Administration Buntan Great General Acceptable Accounting Principles.

The data used by the author is the Primary Data and Secondary Data. Primary data is data obtained from interviews with the treasurer of the village of Great Buntan The preparation of financial statements regarding the history of the village and the village. Secondary data is data from records and documents relating to the village of Great Buntan. eg notebook and village financial statements, as well as the vision and mission of the village. Data collection techniques used by the author is using the survey method, by way of interviews and direct observation. This research analyzes the author uses descriptive analysis with qualitative methods.

Based on the results of this study indicate that the application of Financial Accounting at the Village Administration Buntan Besar Subdistrict Siak Siak Sri Indrapura not fully in accordance with the General Acceptable Accounting Principles.

Keywords: Financial Accounting and Financial Management Village Government

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Bauntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai syarat Akademis dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran akan penulis terima untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Pada pelaksanaan penelitian ini penulis tidak mengalami kendala yang berarti, hal tersebut karena adanya pihak-pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan dan bimbingan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH.,MCL** selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Drs.Abrar,M.Si,Ak.,CA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. **Ibu Dra.Eny Wahyuningsih,M.Si,Ak.,CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. **Bapak Dr. Azwirman, SE.,M.Acc., CPA** selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang selama ini memberikan kemudahan administrasi selama masa perkuliahan.
7. **Bapak Suwanto** selaku Kepala Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura beserta **Bapak Sukardi** selaku kerani Desa Buantan Besar dan **Kakak Fitria Rahayu** selaku Bendahara Desa Buantan Besar yang telah memberikan izin dan telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada **kedua orang tua tercinta Ahmad Mulyadi S.H dan Sumisri** yang selalu memberikan doa, mendidik, membimbing, membrikan cinta yang sangat luar biasa, nasehat, kasih sayang yang besar, dan dukungannya demi keberhasilan penulis yang membuat penulis sangat bersyukur memiliki orang tua yang sangat luar biasa. Dan juga untuk abang-abang dan kakak-kakak tercinta **Akbar Samfajri S.T, Baqy Ilham Samfajri S.H, Fitri Yuniar Handayani S.T, Windi Indra S.T**serta keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, motivasi, nasehat, dan doa kepada penulis atas penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih buat teman-teman penulis terutama **Silmi Uliya, Lelisa Fulandari, Lian Syafitri Rasyid, Febrina Berlianti, Hinggis Cahyani Najwa, Emilia, Amalia Maharani Azis, Suci Maharani Riadi, Sri Pujiani, Etta Natalia, Cindy Alkaff, Lina Novriana, Muhammad iqbal,**

Fajar Rizki Ramadhan, Dedi Kurniawan serta yang tidak penulis sebutkan langsung maupun tidak langsung.

10. Pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan dorongan serta segala kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata , Jazakumullah Khairan Katsira. Semoga Allah SWT membalas semua perhatian dan kebaikan mereka yang telah membangun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, September 2019

Penulis

Annisa Haqi Samfajri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	12
A. Telaah Pustaka.....	12
1. Pengertian Akuntansi	12
2. Pengertian Desa	13
3. Pengertian Akuntansi Desa	14
4. Prinsip-Prinsip Akuntansi.....	15
5. Siklus Akuntansi Keuangan Desa	16
6. Administrasi Desa	19
7. Pengelolaan Keuangan Desa	20
8. Proses Pengelolaan Keuangan Desa.....	21
9. Proses Penyesuaian	23
10. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	25
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	27

12. Laporan Keuangan Desa	27
13. Laporan Kekayaan Milik Desa.....	28
B. Hipotesis	28
BAB III : METODE PENELITIAN.....	29
A. Lokasi Penelitian	29
B. Jenis Data dan Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data	30
BAB IV : GAMBARAN UMUM DESA BUANTAN BESAR.....	31
A. Sejarah Desa	31
B. Demografis	32
C. Struktur Organisasi Desa Buantan Besar	34
D. Visi dan Misa Desa Buantan Besar	36
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Sistem Pencatatan dan Dasar Pencatatan Akuntansi	38
B. Proses Akuntansi	39
C. Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Buantan Besar....	43
D. Penyusunan Laporan Keuangan Desa	52
BAB VI : PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel V.1 : Buku Kas Umum Desa Buantan Besar	39
Tabel V.2 : Buku Bank Desa Buantan Besar	40
Tabel V.3 : Buku Kas Pembantu Pajak.....	41
Tabel V.4 : Jurnal Penerimaan Kas.....	44
Tabel V.5 : Jurnal Pengeluaran Kas	45
Tabel V.6 : Buku Besar Kas di Bendahara	45
Tabel V.7 : Buku Besar Pendapatan Transfer.....	46
Tabel V.8 : Buku Besar Belanja Modal	46
Tabel V.9 : Neraca Saldo	47
Tabel V.10 : Neraca Saldo Disesuaikan.....	50
Tabel V.11: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	55
Tabel V.12 : Laporan Kekayaan Milik Desa	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran II : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Lampiran III : Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
- Lampiran IV : Buku Kas Umum
- Lampiran V : Buku Kas Pembantu Pajak
- Lampiran VI : Buku Bank Desa



DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.I : Struktur Organisasi Desa Buntan Besar 35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana Desa(DD) ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Dana ini dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa ini mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, bisa menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Prioritas penggunaan DD diatur “melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017.” Oleh sebab itu, diperlukan penata usahaan keuangan Desa. Sebab pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan merupakan hal krusial yang harus transparan dan terarah.

Maka Pemerintahan membuat kebijakan dengan memakai Akuntansi Desa yang mana bisa dipergunakan untuk mengendalikan dana desa, agar belanja dengan baik. Akuntansi Desa ialah pencatatan dari seluruh proses transaksi yang terjadi pada desa, dibuktikan dengan nota transaksi yang kemudian akan dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga memperoleh informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan nantinya akan dipakai oleh pihak yang

berkepentingan dengan Desa. Desa memiliki peran yang cukup penting, khususnya didalam dibidang pelaksanaan pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa meneju kemandirian Desa.

Dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Dengan adanya undang-undang tentang desa ini, merupakan penguatan status Desa sebagai pemerintahan masyarakat Desa. Undang-undang tentang desa ini memberikan perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Pengelolaan keuangan desa ialah salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan “ditetapkan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.” Kedua undang-undang tersebut sudah membagikan kewenangan lebih luas ke pemerintahan daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya ialah kekeluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan terget penggunaan anggaran.

Pengelolaan keuangan desa telah membawa dampak yang positif terhadap praktik-praktik keuangan yang efektif dan efisien. Efektivitas dalam hal ini adalah upaya agar rencana kerja serta cara kerja yang dilaksanakan sesuai dan dapat mendukung terhadap pengendalian keuangan. Sementara efisiensi dalam hal ini adalah upaya agar praktik-praktik keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan finansial serta prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintahan.

Pemerintahan dan desa serta memiliki wewenang dalam menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah.

Anggaran adalah hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik yang menyangkut penerimaan maupun pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu, biasanya adalah satuan tahun. Untuk lebih mengetahui tentang sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan negara, maka mesti diketahui bagaimana sistem administrasi keuangan negara diselenggarakan atau diterapkan (Zainal, 2005:33)

Pada prinsipnya tujuan akuntansi pemerintahan adalah sama yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan oleh organisasi tersebut dalam periode tertentu kepada para penggunannya. Dalam (Yelvi Marta Ayu, 2010:10), seiring reformasi dibidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Akuntansi merupakan suatu siklus akuntansi, yang mana artinya memiliki bermacam tahapan khusus dan setelah seluruh tahapan berakhir, maka kegiatan akan terulang kembali sesuai dengan urutannya diawal. Siklus akuntansi yaitu suatu perkiraan tahapan kegiatan akuntansi yang mencakup pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai ketika terjadinya

transaksi. “Adapun tahapan-tahapan yang terdapat didalam siklus akuntansi keuangan desa menurut IAI tahun 2015 adalah:

Tahap Pertama Pencatatan. Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari buktibukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.

Tahap Kedua Penggolongan. Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

Tahap Ketiga Pengikhtisaran. Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar

Tahap Keempat Pelaporan. Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini : (a) Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan ini berisi jumlah

anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. (b) Laporan Kekayaan Milik Desa Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.”

Sistem akuntansi keuangan didalam sebuah instansi pemerintahan merupakan suatu hal yang sanga penting untuk diperhatikan, hal ini disebabkan sistem akuntansi keuangan bisa dipakai menjadi alat pengatur dan pengendalian untuk semua kegiatan keuangan. Fungsi pengaturan keuangan dalam sebuah instansi pemerintahan desa biasanya dipegang oleh Satuan Pemegang Kas, yang terdiri dari satuan orang pemegang kas dan beberapa orang Pembantu Pemegang Kas denga tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Mengingat begitu pentingnya masalah keuangan ini, pemerintah merasa perlu membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah keuangan tersebut. Hal ini bertujuan agar tercipta praktik-praktik keuangan yang efektif dan efisien. Efisiensi dalam hal ini adala upaya agar praktik-praktik keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan finansial serta prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintahan. Semenstara efektivitas dalam hal ini adalah upaya agar rencana kerja serta cara kerja yang dilaksanakan sesuai dan dapat pendukung pengendalia keuangan.

Disamping itu permendagri No.113 tahun 2014 ini mengharuskan Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa (keuangan) yang terdiri dari: buku kas umum, buku kas harian , buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan neraca desa, serta laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja

desa (LRADes). Selain itu permendagri juga mengharuskan pengelolaan keuangan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Pelaksanaan akuntansi pada Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura berpedoman pada “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Siak Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut diharapkan desa bisa memiliki kepastian hukum dan kepastian nilai sehingga desa mampu mengelola keuangannya secara tepat dan mandiri.”

Penelitian mengenai akuntansi dana desa yang sudah diteliti oleh kadek (sutrawati 2016) di desa pudaria jaya kecamatan moramo makan menyimpulkan tugas perangkat desa didalam akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa dikatakan sudah berperan hal ini dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, Agus Widodo (2016) mengenai sistem akuntansi pengelolaan dana desa dimana penelitian dilakukan di Desa Kismoyoso dan Desa Girioto Kecamatan Ngemplak Boyolali. Menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil

penelitian pada kedua desa diketahui bahwa para aparat desa memang belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Undang-Undang 6/2014. Mereka belum memahami sepenuhnya pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri 113/2014.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh ni nyoman alit triani dan susi handayani (2018) mengenai praktik pengelolaan keuangan dana desa pada desa plosogeneng, donowari, dan pesantren menyimpulkan bahwa berkaitan dengan penyaluran dana desa, pengelolaan dana desa di jawa timur telah sesuai Permenkeu No.7 tahun 2016 penyalurannya dilakukan melalui 2 tahap. Tetapi saat pencairan tahap pertama ditemukan keterlambatan pencairan, terkhusus di Desa Plosogeneng. Kebijakan Pemerintah Daerah Malang yang akan mencairkan dana desa jika tiga ataupun empat desa sudah mengdesa jika tiga atau empat desa telah mengusulkan pencairan menjadi permasalahan baru meskipun saat ini tidak menjadi kenbaru meskipun saat ini tidak menjadi kendala besar bagi Desa Donowarih.

Desa Buantan Besar merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura pada tahun 2017 Desa Buantan Besar menerima dana desa sebesar (RP. 807.919.274). Desa Buantan Besar membuat proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa, karena hal tersebut merupakan bagian dari proses perencanaan dari kegiatan pengelolaan keuangan desa. Proses akuntansi yang dilakukan desa Buantan Besar dimulai dari penyusunan anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka selanjutnya anggaran dapat

dilakukan. Transaksi yang sudah terjadi akan dicatat pada Surat Permintaan Pembayaran sebagai bukti transaksi, selanjutnya bukti-bukti transaksi tersebut dicatat dalam Buku Kas Umum (lampiran 1) digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi baik yang terkait dengan penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja, penerimaan/pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya membuat buku pembantu yang terdiri dari Buku Bank Desa (lampiran 2), Buku Kas Pembantu Pajak (lampiran 3), Laporan PertanggungJawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa (lampiran 4), dari transaksi yang telah terjadi maka menghasilkan sebuah neraca yang berfungsi untuk mengetahui Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 5).

Berdasarkan proses akuntansi yang dilakukan Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura terdapat beberapa permasalahan. Masalah pertama yaitu dalam menyusun Laporan PertanggungJawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lampiran 4) Desa Buntan Besar tidak membuat penyesuaian terhadap Bahan Habis Pakai. Masalah kedua, pada Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 5) dimana tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap sehingga tidak adanya akumulasi penyusutan dan tidak menunjukkan nilai aset tetap yang sebenarnya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pada Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura Dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini ialah agar mengetahui kesesuai antara Penerapan Akuntansi Pada Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura Dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi desa dalam pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian laporan keuangan Desa Buntan Besar.

2. Bagi Kantor Desa Buntan Besar

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengembangan akuntansi keuangan di Desa Buntan Besar.

3. Bagi Peneliti Lanjutan

Dapat dijadikan bahan untuk pertimbangan atau referensi untuk penelitian yang sama maupun yang sejenis, yang bisa digunakan sebagai pembanding

bagi penelitian lebih lanjut atas materi yang sama, dan sehingga penelitian ini dapat di sempurnakan.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi enam bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menerangkan telaah pustaka yang berhubungan dengan penulisan dan hipotesis serta mengemukakan konsep operasional penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini dijelaskan tentang lokasi penelitian operasional variabel penelitian, populasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM (OBJEK PENELITIAN)

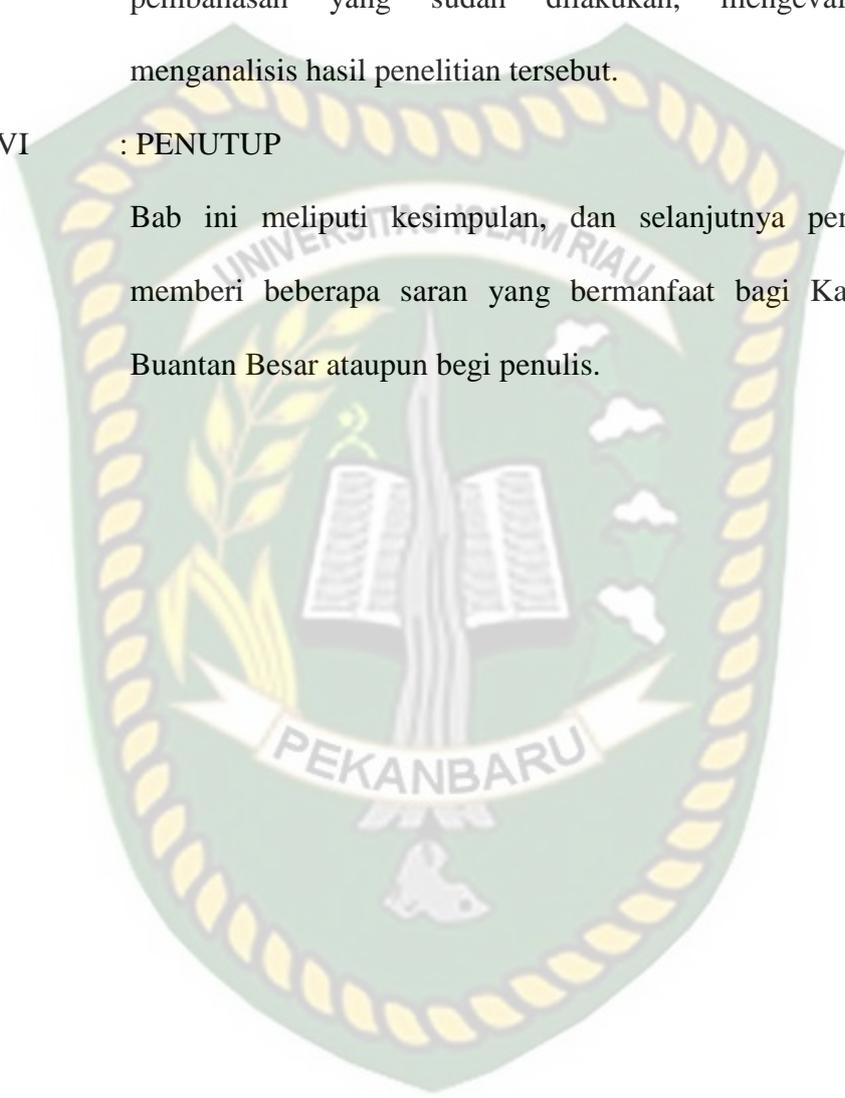
Dalam Bab ini dikemukakan tentang gambaran umum mengenai pemerintahan desa, visi dan misi pembangunan desa, dan struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari pembahasan yang sudah dilakukan, mengevaluasi dan menganalisis hasil penelitian tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan, dan selanjutnya penulis akan memberi beberapa saran yang bermanfaat bagi Kantor Desa Buantan Besar ataupun bagi penulis.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan satu kesatuan sistem informasi pemrosesan data sehingga menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan.

Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3) menyatakan, akuntansi ialah sistem informasi keuangan, memiliki tujuan menghasilkan informasi yang signifikan untuk pihak yang bersangkutan.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:36) akuntansi ialah suatu kegiatan jasa, yang memiliki fungsi sebagai penyaji informasi kualitatif, terutama informasi yang bersifat keuangan, mengenai entitas ekonomi yang mana bisa bermanfaat didalam pengambilan keputusan ekonomi dengan teknik mencatat, menggolongkan, transaksi yang berupa keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

“Definisi akuntansi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. Dari pengertian akuntansi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi dapat memberikan sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya sebagai dasar pengambilan keputusan dengan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan.”

2. Pengertian Desa

Sebelum UU No 6 Tahun 2014 di sahkan, “pengertian desa menurut UU No. 22 tahun 1999 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.”

“Serta menurut UU No. 5 tahun 1979 menyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Setelah disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pada Bab I pasal 1 menyatakan bahwa:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Suhartono (2000) dalam Rohman. A,dkk (2018;3), yang dimaksud desa adalah:

Desa dalam pengertian sosiologis, digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempatan tinggal dalam

suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam.

“Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

3. Pengertian Akuntansi Desa

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data transaksi, beserta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi akuntansi bisa digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti dalam pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan adanya nota transaksi yang mana langkah berikutnya akan dibuat pelaporan keuangan hingga membentuk informasi laporan keuangan yang akan digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

”Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.”

“Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.”

Menurut Surjaweni (2015:17) Akuntansi Desa ialah pencatatan yang dilakukan dari proses transaksi yang sudah terjadi pada desa, dibuktikan dengan adanya nota-nota transaksi, yang selanjutnya akan dilaksanakan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga memperoleh informasi berbentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan desa.

4. Prinsip-Prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi ialah suatu nilai yang bisa dijadikan panutan dan ditaati oleh pembuat standar akuntansi, dan memiliki fungsi untuk mengawasi dan memberitahukan peringatan dengan ketetapan yang sangat jelas dan telah diakui kebenarannya. Dengan cara mematuhi prinsip akuntansi didalam menyusun laporan keuangan, dengan hal ini akan mempermudah pekerjaan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan juga membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah Desa lainnya.

Terdapat beberapa prinsip akuntansi yang dipakai:

a. Prinsip Harga Perolehan

Prinsip ini memiliki aturan yang mana harga perolehan dari harta/aset, kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

b. Prinsip realisasi pendapatan

Prinsip ini ialah pengkajian tentang cara mengukur dan memastikan nilai dari pendapatan yang sudah didapatkan. Pengukuran pendapatan bisa diukur dengan penambahan harta/aset dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintahan Desa dilakukan

ketika terjadinya transaksi dan bisa dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.

c. Prinsip objektif

Prinsip ini menunjuk pada laporan keuangan yang didukung dengan adanya bukti transaksi yang ada. Prinsip objektifitas memiliki maksud bahwa catatan dan laporan akuntansi harus berdasarkan pada data yang bisa dipercaya sebagai laporan yang menyediakan informasi yang tepat dan berguna.

d. Prinsip pengungkapan penuh

Didalam pembentukan laporan keuangan sebaiknya menyampaikan suatu informasi penuh yang tersedia dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan.

e. Prinsip konsistensi

Saat pembentukan laporan keuangan perlu memiliki nilai konsistensi ketika menggunakan metode, pedoman, dan standar ketika pembentukannya. Laporan keuangan juga perlu memiliki nilai banding, yang mana memiliki arti bahwa laporan keuangan bisa disamakan dengan laporan keuangan pemerintah desa lainnya dengan periode waktu yang sama maupun sebaliknya.

5. Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Siklus akuntansi adalah gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang mencakup pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai terjadi sebuah transaksi.

Siklus akuntansi juga sebagai proses penyediaan laporan keuangan organisasi dalam periode tertentu yang terdiri dari sebagian tahapan tertentu dan setelah tahapan, kegiatan tahapan akan terulang kembali sesuai dengan urutannya.

“Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP 2015 dalam standar akuntansi keuangan Tahun 2015 Tahapan siklus akuntansi adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap pencatatan
Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Proses pembuatan informasi keuangan berasal dari pencatatan bukti-bukti transaksi. Pencatatan bukti transaksi merupakan proses yang sangat penting dan berpengaruh pada proses penyusunan laporan keuangan. Jika terjadi kesalahan pada penulisan bukti-bukti transaksi, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan tidak valid dan relevan. Selain itu tentunya akan menyesatkan pengguna informasi keuangan tersebut.
- 2) Tahap penggolongan
Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit. Setiap transaksi yang terjadi baik yang terkait dengan penerimaan pendapatan pengeluaran belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan dicatat pada Buku Kas Umum (BKU). Selanjutnya atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan pencatatannya dibukukan ke dalam buku besar dan buku besar pembantu yang sesuai.
- 3) Tahap pengikhtisaran
Setelah seluruh transaksi dicatat pada Buku Kas Umum dan Buku Besar, tahap berikutnya adalah tahap pengikhtisaran, pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dilakukan untuk meyakinkan bahwa proses yang dilakukan telah dilakukan pencatatannya dengan benar (pengecekan debit dan kreditnya sudah seimbang). Dengan dibuatnya neraca saldo maka akan memudahkan dalam penyusunan Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, dan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran.
- 4) Tahap pelaporan
Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa), dan Laporan Realisasi Anggaran. (Permendagri 113 Tahun 2014).”

Berikut tahapan atau siklus akuntansi menurut Herry (2012:73) yaitu:

1. Transaksi
Transaksi ialah suatu aktivitas untuk mengganti kedudukan keuangan pada suatu entitas serta pencatatannya membutuhkan data, dokumen maupun bukti pembantu didalam kegiatan operasi suatu entitas.
2. Dokumen sumber data (pendukung transaksi)
Dokumen pendukung transaksi akan dianalisa dan informasi yang terkandung pada dokumen akan dicatat dalam jurnal.
3. Jurnal
Jurnal dipergunakan untuk mencatat segala bukti transaksi keuangan yang timbul akibat berbagai transaksi keuangan didalam periode tertentu. Jurnal juga dikenal sebagai buku pemasukan utama books of original entry sebab menjadi tempat terjadinya pencatatan transaksi pertama atau penyesuaian pemasukan adjusting entries.
4. Posting ke buku besar
Buku besar ialah kumpulan rekening-rekening yang berisi informasi mengenai saldo maupun nilai transaksi pada periode akuntansi tertentu. Buku besar berfungsi untuk memudahkan dalam menghitung saldo masing-masing akun, sehingga dapat memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Selesai dilakukannya penjurnalan selanjutnya jumlah yang didapat pada debit dan kredit akan dipeindahkan ke rekening buku besar yang sesuai.
5. Neraca saldo
Neraca saldo ialah pengelompokan terakhir saldo didalam buku besar maupun daftar yang berisi semua rekening perkiraan pada buku besar.
6. Jurnal penyesuaian
Jurnal penyesuaian dikenal juga sebagai jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening ke saldo yang sesungguhnya samapa dengan periode akuntansi, untuk memisahkan anatar pendapatan dan beban dari periode satu ke periode lainnya. Fungsi jurnal penyesuaian ialah untuk memutuskan saldo catatan akun buku besar ketika akhir periode, serta untuk menghitung pendapatan dan beban selama periode yang bersangkutan.
7. Neraca saldo setelah penyesuaian
Setelah memposting prosedur akuntansi langkah selanjutnya ialah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ialah daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu.
8. Laporan keuangan
Merupakan catatan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi. Laporan keuangan terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- b. Laporan Arus Kas
 - c. Neraca
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
9. Jurnal penutup
Merupakan jurnal yang dibuat ketika akhir periode akuntansi sebagai penutup akun-akun nomil sementara. Dampak dari penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan nol pada awal periode akuntansi. Selanjutnya pada jurnal penutup ke setiap akun buku besar terkait.
10. Neraca saldo setelah penutupan
Neraca saldo setelah penutupan dibuat dari saldo-saldo yang terdapat di setiap akun perkiraan didalam buku besar, sesudah jurnal penutup. Neraca saldo setelah penutupan berisi akun-akun riil saja, seperti harta, utang, dan modal. Yang bermanfaat untuk memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dan kredit akun pada buku besar setelah dilakukan penutupan.”

6. Administrasi Desa

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2006 administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Jenis dan bentuk Administrasi Desa “menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 dalam buku sujarweni(2015:13).

1. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari:
 - a. Buku Data Peraturan Desa.
 - b. Buku Data Keputusan Kepala Desa.
 - c. Buku Data Inventaris Desa.
 - d. Buku Data Aparat Pemerintahan Desa.
 - e. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa.
 - f. Buku Data Tanah di Desa.
 - g. Buku Agenda.
 - h. Buku Ekspedisi.
2. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk, terdiri dari:
 - a. Buku Data Induk Penduduk Desa.
 - b. Buku Mata Mutasi Penduduk Desa.
 - c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan.
 - d. Buku Data Penduduk Sementara.

3. Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri dari:
 - a. Buku Anggaran.
 - b. Buku Kas Umum.
 - c. Buku Kas Harian Pembantu.
 - d. Buku Kas Pembantu Pajak.
 - e. Buku Kas Pembantu Bank.
4. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Buku Rencana Pembangunan.
 - b. Buku Kegiatan Pembangunan.
 - c. Buku Inventaris Proyek.
 - d. Buku Kader-Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat.
5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, terdiri dari:
 - a. Buku Data Anggota BPD.
 - b. Buku Data Keputusan BPD.
 - c. Buku Data Kegiatan BPD.
 - d. Buku Agenda BPD.
 - e. Buku Ekspedisi BPD”

7. Pengelolaan Keuangan Desa

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian ialah bagaimana langkah berikutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggung jawabkannya.

“Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa.”

”Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.”

8. Proses Pengelolaan Keuangan Desa

1) Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Mekanisme perencanaan “menurut Ikatan Akuntansi Indonesia Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- f. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:
 - 1) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - 2) Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
- 2) Pelaksanaan
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
 - d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
 - e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
 - f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
 - g. Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - h. Pelaksanaan Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3) Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib :

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4) Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Semester Pertama.
- b. Laporan Semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

5) Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran laporan yang meliputi:
 - 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.”

9. Proses Penyesuaian

Penyesuaian ialah proses didalam pembentukan dan didalam penyampaian laporan keuangan, yang beberapa akun tertentu masih disesuaikan dengan prosedur khusus dengan yang ditujukan untuk memastikan setiap akun nominal yang memperlihatkan pendapatan dan beban sebaiknya diakui didalam periode tertentu, akan mengakibatkan adanya laba yang sebenarnya diperoleh pada periode tersebut, untuk menentukan setiap akun rill memperlihatkan jumlah aset

ataupun kewajiban yang sesungguhnya pada akhir periode. Untuk memperbaiki saldo akun pada akhir periode akuntansi dikatakan juga dengan ayat jurnal penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode yang dimaksudkan untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan ataupun akun nominal agar bisa memperlihatkan kondisi yang sesungguhnya. AJP mempengaruhi paling tidak satu akun laba rugi dan satu akun laporan posisi keuangan.

Adapun menurut Jarot Tri Bowo Santoso(2013) penyesuaian adalah:

Jurnal penyesuaian ialah jurnal yang dibuat pada akhir periode yang disebabkan oleh adanya akun-akun yang tidak mendeskripsikan jumlah rill.”

Ada 4 jenis akun yang memerlukan penyesuaian:

1. Beban dibayar di muka

Beban dibayar dimuka yaitu akun yang pada mulanya dicatat sebagai aset karena kasnya sudah dibayarkan, walaupun jasa atau barangnya belum diterima. Sejalannya waktu yang telah berlalu aset ini berubah menjadi beban. Asuransi dibayar dimuka dan sewa dibayar dimuka yaitu contoh beban dibayar dimuka yang membutuhkan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

2. Pendapatan diterima di muka

Pendapatan diterima di muka yaitu pendapatan yang diterima di muka tapi belum diterima. Pendapatan harus dicatat dalam periode akuntansi dimana pendapatan tersebut diperoleh. Jadi *prepaid income* harus disajikan pada periode akuntansi dimana barang atau jasa sehubungan dengan pendapatan dibayar dimuka telah dilakukan.

3. Pendapatan yang masih akan diterima

Pendapatan yang masih akan diterima yaitu penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan Perusahaan pada periode berjalan, karena manfaat atas aktiva, barang, dan/atau jasa Perusahaan telah diterima oleh pihak lainnya. Salah satu contoh pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan bunga.

4. Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar yaitu beban atau kewajiban yang sudah menjadi beban dilihat dari segi waktu ,tetapi belum dibayar dan dicatat. Hutang beban harus disamakan dengan pembentukan jurnal penyesuaian,tujuan ialah untuk membenarkan adanya beban yang belum dibayar dan menjadi kewajiban dalam periode akuntansi tersebut.

Terdapat 2 fungsi jurnal penyesuaian:

1. Untuk menentukan saldo dicatat pada akun buku besar pada akhir periode, jadi setiap asumsi pada saldo yang didapatkan rill. Terkhusus untuk perkiraan aset dan kewajiban memperlihatkan jumlah yang sebenarnya.
2. Untuk menjumlahkan setiap perkiraan nominal pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan.

10. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

“Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Asas pengelolaan keuangan desa,ialah sebagai berikut:

1. Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang pencapaian tujuan telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.”

11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011:213).

APBDesa pada dasarnya ialah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas:

- 1) Pendapatan Desa
Pendapatan desa mencakup seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang mana hal tersebut merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasi menurut kelompok dan jenis.
- 2) Belanja Desa
Belanja desa mencakup seluruh pengeluaran dari rekening desa yang mana hal tersebut ialah kewajiban desa dalam kurun waktu 1 tahun anggaran yang tidak diterima pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
- 3) Pembiayaan Desa
Pembiayaan desa mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan ataupun pada tahun anggaran selanjutnya. Pembiayaan desa terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

12. Laporan Keuangan Desa

Membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan ialah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang bisa digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

“Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan , laporan keuangan merupakan:

Laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

13. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa ialah laporan yang menampilkan barang yang dimiliki oleh desa yang bersumber dari kekayaan asli desa, dibeli/diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa merupakan susunan dari kegiatan, yang dimulai dari perencanaan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penataan usaha, pelaporan, penelitian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura dan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura.

B. Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah:

a. Data primer

Data primer ialah data yang peneliti dapat dari sumber pertama, berupa wawancara dengan pengurus keuangan Desa Buntan Besar mengenai sejarah berdirinya Desa Buntan Besar dan tentang proses penyusunan laporan keuangan pada desa, pelaksanaan keuangan Desa Buntan Besar.

b. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang peneliti peroleh dari Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura berupa dokumen yang sudah disusun dalam bentuk sudah jadi, seperti laporan-laporan keuangan, visi misi Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dioakai pada penelitian ini adalah:

- ##### a. Wawancara secara langsung kepada pengurus keuangan Desa Buntan Besar, juga mengajukan beberapa pertanyaan mengenai hal-hal yang akan diteliti meliputi kebijakan operasioanal dan kebijakan dibidang akuntansi,

pembentukan laporan keuangan dan beberapa pertanyaan bagi studi pendahuluan untuk mendapatkan permasalahan yang akan diteliti.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu tahap didalam mengumpulkan data dengan cara memfotocopy dokumen atau laporan keuangan yang diterima dari Desa Buntan Besar, baik berupa peraturan pemerintah, undang-undang.

D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis memakai metode deskriptif yaitu, menganalisa dan mengumpulkan data, yang kemudian disusun berdasarkan kelompoknya agar data-data tersebut bisa diteliti berdasarkan teori relevan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas dan kemudian akan diperoleh kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA BUANTAN BESAR

A. Sejarah Desa

Desa Buantan besar merupakan sala satu desa di Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura. Desa Buantan Besar terbentuk 9 tahun yang lalu hasil dari pemekeran Desa Langkai yang resmi berdiri pada tahun 2006. Masyarakat desa buantan besar memiliki berbagai macam suku yang hidup di desa buantan besar, suku yang hidup secara rukun berdampingan dan hormat menghormati menjalankan adat istiadat serta norma agama sesuai yang dianut.

Desa Buantan Besar secara geografis terletak pada $0^{\circ} 48' 50''$ Lintang Utara sampai $0^{\circ} 53' 09''$ Lintang Utara, $101^{\circ} 55' 30''$ Bujur Timur sampai $102^{\circ} 03' 58''$ Bujur Timur dengan luas Desa Buantan Besar lebih kurang 8619.16 ha. Jarak dengan Kota Kecamatan yaitu sekitar 14 Kilometer dan dari Kota Kabupaten sejauh 14 Kilometer, sedangkan jarak ke Kota Provinsi sekitar 145 Kilometer.

Kondisi tanah tergolong datar dan 90% dari luas wilayah merupakan tanah Redang sehingga wilayah Masyarakat Desa Buantan Besar banyak yang menjadi petani pekebun dan hanya sedikit yang membuka Palawija maupun tanaman agrobisnis.

Letak Geografis Desa Buantan Besar berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Sungai Buantan Besar
- Sebelah Selatan : Kampung Langkai
- Sebelah Barat : Kampung Tumang

- Sebelah Timur : Sungai Siak

Jarak tempuh dari pusat kota ke pemerintahan Desa :

- Jarak dari kantor kecamatan :14km
- Jarak dari ibu kota kabupaten : 17km
- Jarak dari ibu kota provinsi : 142km

B. Demografis

Berdasarkan data Administrasi pemerintahan Desa jumlah penduduk Desa Buantan Besar saat ini berkisar 2.058 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 520KK yang tersebar di Dusun Raja Kecil dan Dusun Kolam Hijau dengan perincian 1.075 orang laki-laki dan 983 orang perempuan. Jumlah penduduk Desa Buantan Besar berdasarkan jenis kelamin dan KK dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Desa Buantan Besar

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1.075	52,2%
2	Perempuan	983	47,8%
	Jumlah	2.058	100%

Sumber: Monografi Desa Buantan Besar

Tabel IV.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia di Kampung Buantan Besar

No	Kelompok Usia	Jumlah	Persentase
1	0-12 Bulan	75	4%
2	>1 - <5 Tahun	242	12,2%
3	>=5 - <7 Tahun	107	2,4%
4	>=7 - <=15 Tahun	334	16,2%
5	>15 – 56 Tahun	1.204	60,2%

6	>56 Tahun	96	5%
	Jumlah	2.058	100%

Sumber: Monografi Desa Buantan Besar Tahun 2017

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah penduduk yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia >56 Tahun yaitu 5% dari total jumlah penduduk.

Penduduk usia produktif pada usia anantara 15-56 Tahun di Desa Buantan Besar jumlahnya cukup signifikan, yaitu 1.204 jiwa atau 60,2% dari total jumlah penduduk.

Tabel IV.3

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Buantan Besar

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	299	302	601	33,68%
2	SD/Madrasah	392	398	790	28,27%
3	SMP/Sederajat	206	143	349	17,89%
4	SMA/Sederajat	157	124	281	14,21%
5	Sarjana Muda (D3)	11	13	24	1,23%
6	Strata I (S1)	10	3	13	0,72%
7	Strata II (S2)	-	-	-	-
	Jumlah	1.075	983	2.058	100%

Sumber: Monografi Desa Buantan Besar

Bedasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa di Desa Buantan Besar kebanyakan penduduk hanya memiliki pendidikan formal pada level pendidikan dasar. Tingka pendidikan di desa bauantan besar relative masih rendah. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat Desa Buantan Besar yang belum mencapai tingkat kesejahteraan, sebab sebagian besar mata pencarian masyarakat merupakan buruh tani yang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masih sulit.

C. Struktur Organisasi Desa Buantan Besar

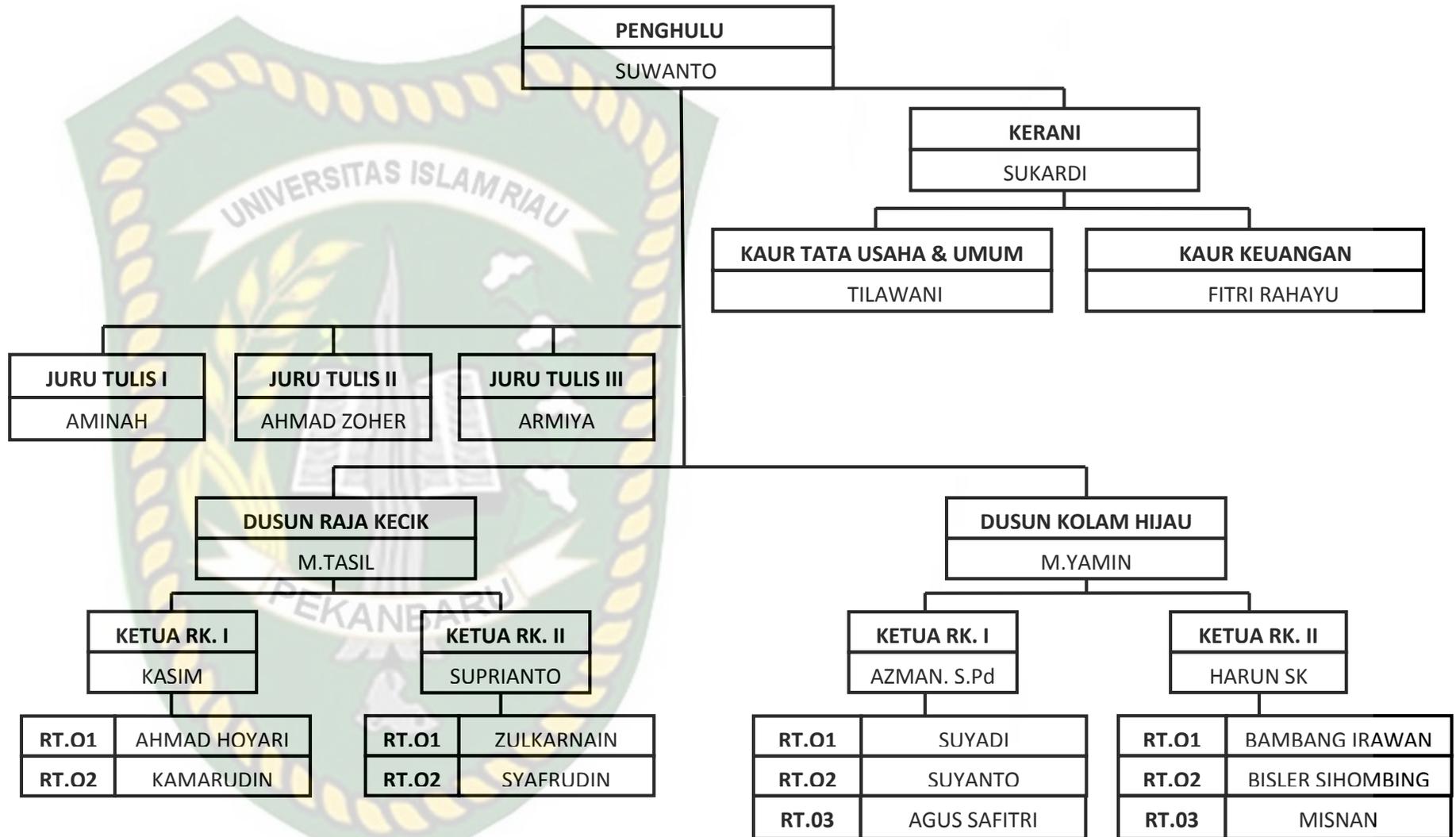
Untuk meningkatkan pelayanan dan melancarkan kegiatan pemerintahan maka desa memiliki beberapa aparat yang dapat melaksanakan tugasnya dalam membantu kepala Desa.

Pemerintahan Desa Buantan Besar diperintah seorang Kepala Desa dengan dibantu Aparat Desa dan Perangkat Desa serta dilengkapi oleh beberapa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Organisasi Pemuda, Organisasi Masyarakat, serta diawasi pemerintahannya oleh suatu Badan Permusyawaratan Desa.



Gambar IV.4

STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN KAMPUNG BUANTAN BESAR KECAMATAN
SIAK KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA



D. Visi dan Misi Desa Buantan Besar

1. Visi Desa Buantan Besar

Visi kampung ialah suatu presiksi yang menantang perihal masa depan yang diinginkan dengan cara melihat potensi dan kebutuhan kampung dengan jangka waktu tertentu. Penentuan visi kampung dilakukan dengan pendekatan partisipasi melalui musyawarah untuk mendapatkan kata sepakat, dengan melibatkan pihak yang berkepentingan diKampung. Pertimbangan kondisi eksternal di kampung, seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan siak memiliki titik berat di sektor pertanian dan perkebunan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Kampung Buantan Besar adalah :

“Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Memberdayakan Potensi Kampung Untuk Mendukung Pembangunan Disegala Bidang”

2. Misi Desa Buantan Besar

Selain pembentukan Visi, juga ditetapkan Misi yang mencantumkan suatu penjelasan yang perlu dilaksanakan oleh Kampung supaya tercapai Visi Kampung tersebut. Pernyataan dari Visi selanjutnya akan dijabarkan kedalam misi agar bisa dilaksanakan. Misi kampung Buantan Besar adalah sebagai berikut :

- a. Menitik beratkan pada sektor perkebunan, pertanian, perternakan dan buah-buahan.
- b. Meningkatkan pelayanan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat kampung.

- c. Menggali potensi kampung untuk mengembangkan kreatifitas masyarakat sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
- d. Mengikut sertakan pelatihan dan pendidikan agar setara dengan lajunya perkembangan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada bab I dan dengan pedoman pada teoritis yang relevan seperti yang diuraikan bab II, maka pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian pada Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura. Penulis akan menganalisis tentang akuntansi yang diterapkan pada Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura.

A. Sistem Pencatatan dan Dasar Pencatatan Akuntansi

Pada sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum yang digunakan Desa Buntan Besar terhadap transaksi yang terjadi yaitu berdasarkan pencatatan single entry yang dimana pencatatan dilakukan menggunakan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Pencatatan transaksi ekonomi pada sistem ini dilakukan dengan cara mencatatnya satu kali. Sedangkan untuk pencatatan pengakuan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum yang dilakukan oleh Desa Buntan Besar menggunakan basis kas yang dimana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas dan pelaporannya terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, yang dimana laporan realisasi anggaran termasuk kedalam Laporan Pelaksanaan Anggaran, terdapat juga laporan finansial yang dimana laporan finansial ini menggunakan basis akrual. Laporan finansial adalah posisi keuangan yang dimana posisi keuangan menggunakan akrual basis yang merupakan basis akuntansi yang

dimana mengakui, mencatat dan menyajikan suatu transaksi pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

B. Proses Akuntansi

Proses akuntansi yang dilakukan Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai, maupun secara kredit. Pada Desa Buantan Besar semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang dicatat pada Buku Kas Umum (Lampiran 1). Berikut salah satu transaksi dapat dilihat pada tabel V.1.

Tabel V.1
Buku Kas Umum Desa Buantan Besar
Bulan Desember 2017

No	Tgl	Rek	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12/06/2017		Tarik Tunai Dana Kampung/APBN Tahap I Kas di Bendahara	354.172.200	0	0003/C ASH/0 1.15/20 17	156.338.856	397.633.492
2	12/06/2017		Penyusunan APBKampung/APB Kampung Perubahan Kas di Bendahara	0	2.850.000	0014/S PP/01. 15/201 7	159.188.856	394.783.492
3	12/06/2017		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan SK II Kas di Bendahara	0	128.246.100	0016/S PP/01. 15/201 7	290.304.956	263.167.392
4	12/06/2017		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Box Culvert Kad di Bendahara	0	53.659.000	0019/S PP/01. 15/201 7	516.731.056	37.241.292

Sumber : Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura

2. Buku Bank

Setelah adanya transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran rekening bank maka Desa Buantan Besar akan membuat Buku Bank (Lampiran 2) yang digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangkaian penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Dalam Buku Bank pencatatan dilakukan secara benar dan tertib. Format buku bank pada Desa Buantan Besar terdapat uraian transaksi, nomor bukti, pemasukan setoran dan bunga, pengeluaran ada penarikan, pajak, biaya admin, dan yang terakhir adalah saldo. Pada akhir pembukuan Buku Bank ditutup secara tertib dan ditanda tangani oleh Bendahara dan Kepala Desa. Pencatatan pada Buku Bank dapat dilihat pada tabel V.2

Tabel V.2
Buku Bank Desa Buantan Besar
Tahun Anggaran 2017

No	Tanggal	Uraian transaksi	No Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	Biaya admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07/06/2017	Penerimaan Dana Desa/ APBN Tahap I No.1461/SP2 D/2017	0006/TBP/01.15 /2017	484.751 .564	-	-	-	-	518.352 .130
2	12/06/2017	Tarik Tunai Dana ADK Tahap I	0002/CASH/01.15/2017	-	-	6.220.000	-	-	512.132 .130
3	12/06/2017	Tarik Tunai Dana Desa/ APBN Tahap I	0003/CASH/01.15/2017	-	-	354.172 .200	-	-	157.959 .930
4	12/07/2017	Penerimaan Dana Alokasi Dana Desa Tahap I Kurang Bayar 2017 No.2457	0009/TBP/01.15 /2017	160.102 .482	-	-	-	-	318.062 .412

Sumber: Desa Buantan Besar

3. Buku Kas Pembantu Pajak

Selanjutnya Desa Buantan Besar juga membuat Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 3) yang dimana buku kas pembantu pajak ini digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangkaian penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Buku Kas Pembantu Pajak juga digunakan untuk mencatat pungutan atau potongan pajak yang dilakukan oleh Bendahara Desa serta sebagai alat untuk mencatat penyetoran pajak ke kas negara sesuai dengan Undang-Undang. Atas pungutan maupun potong pajak ini tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Umum dan hanya dicatat pada Buku Kas Pembantu Pajak. Format dan pencatatan Buku Kas Pembantu Pajak Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura dapat dilihat pada Tabel V.3

Tabel V.3
Buku Kas Pembantu Pajak
Tahun Anggaran 2017

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	12/06/2017	Dibayarkan honor tim panitia penyusunan APBKampung perubahan tahun 2017 Potongan Pajak PPh Pasal 22	51.000	-	51.000
2	12/06/2017	Dibayarkan belanja makan dan minum penyusunan APBKampung Tahun 2017 kepada rumah makan langkai Pajak restoran	61.200	-	112.200
3	12/06/2017	Dibayarkan belanja makan dan minum untuk kegiatan kampung tangguh bencana kepada rumah makan Pajak restoran	102.000	-	214.200
4	12/06/2017	Dibayarkan pembelian material pembangunan Jalan SK II Kepada Toko PANTURA Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	1.748.810 11.658.736	- -	1.963.010 13.621.746
5	12/06/2017	Dibayarkan pembelian material pembangunan Jalan SK IV Kepada Toko UD.ALYA&UMI Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	1.748.810 11.658.736	- -	15.370.556 27.029.292

Sumber : Desa Buantan Besar

4. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Setelah semua perkiraan sudah dibukukan di dalam buku kas umum dan buku bank, buku pembantu pajak mereka akan mengelompokkan perkiraan perkiraan biaya tersebut berdasarkan anggaran yang telah disusun. Untuk mempertanggungjawabkan keuangan Desa yang sudah dibuat, maka perlu dibuat Laporan Realisasi Anggaran (Lampiran 4) yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintahan pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Kekayaan Milik Desa

Setelah semua perhitungan telah dilakukan maka selanjutnya membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 5). Laporan Kekayaan Milik Desa merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Desa Buntan Besar mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada periode satu tahun. Laporan Kekayaan Milik Desa merupakan laporan yang menggambarkan barang milik desa yang dimana berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau diperoleh hak lainnya yang sah.

C. Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Buantan Besar

Pencatatan Akuntansi yang diterapkan oleh Desa Buantan Besar pada saat ini telah menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi yang dapat diinput melalui Siskeudes. Pengelolaan laporan keuangan Desa Buantan Besar pada dasarnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014. Semua transaksi yang dicatat pada Buku Kas Umum, penerimaan kas dicatat pada kolom penerimaan dan pengeluaran kas dicatat pada kolom pengeluaran, berikut dibawah ini beberapa contoh transaksi yang ada pada Buku Kas Umum:

- | | |
|--------------|--|
| 12 Juni 2017 | : Diterima Dana Desa Tahun 2017 sebesar
Rp 354.172.200 |
| 12 Juni 2017 | : Dibayarkan penyusunan APBKampung/
APBKampung perubahan sebesar Rp 2.850.000 |
| 12 Juni 2017 | : Dibayarkan pembangunan/rehabilitasi/pemelihara-
an Jalan SK II sebesar Rp 128.246.000 |
| 12 Juni 2017 | : Dibayarkan pembangunan/rehabilitasi/pemelihara-
an Jembatan Box Culvert sebesar Rp 53.659.000 |

1. Buku Kas Umum

Pada Desa Buantan Besar semua transaksi yang terjadi baik penerimaan maupun pengeluaran dicatat pada buku kas umum. Setelah transaksi dicatat pada Buku Kas Umum, seharusnya Desa Buantan Besar membuat jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas. Tetapi Desa Buantan Besar belum melakukan pembuatan jurnal terhadap penerimaan kas dan pengeluaran kas. Berikut jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas :

a. Jurnal Penerimaan Kas

Berdasarkan penjelasan diatas, pencatatan transaksi yang dilakukan Desa Buntan Besar tidak langsung di jurnal hanya langsung dicatat ke Buku Kas Umum. Seharusnya setiap transaksi yang terjadi harus langsung di jurnal kedalam penerimaan kas agar informasinya akurat. Desa Buntan Besar belum melakukan pemisahan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pada tabel V.4 menampilkan contoh jurnal penerimaan kas yang seharusnya diterapkan ole Desa Buntan Besar.

Tabel V.4
Jurnal Penerimaan Kas
Tahun Anggaran 2017

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit		
			(Rp)			
			Kas	Pendapatan Asli Desa	Alokasi Dana Desa	Pendapatan lain-lain
12/06/2017	Dana Desa Tahap I		354.172.200		354.172.200	

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

b. Jurnal Pengeluaran Kas

Berdasarkan penjelasan diatas pencatatan transaksi yang dilakukan Desa Buntan Besar tidak langsung di jurnal hanya langsung dicatat kedalam Buku Kas Umum. Seharusnya setiap transaksi yang terjadi harus langsung di jurnal kedalam pengeluaran kas agar informasinya akurat. Desa Buntan Besar belum melakukan pemisahan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pada tabel V.5 menampilkan contoh jurnal pengeluaran kas yang seharusnya diterapkan oleh Desa Buntan Besar.

Tabel V.5
Jurnal Pengeluaran Kas
Tahun Anggaran 2017

Tang gal	Keterangan	R ef	Debit (Rp)			Kredit (Rp)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang Dan Jasa	Belanja Modal	Kas
12/06 /2017	Penyusunan APBKampung/APBKampung perubahan			2.850.00 0		2.850.000
12/06 /2017	Pembangunan/Rehabilitasi/P emeliharaan Jalan SK II				128.246.10 0	128.246.10 0
12/06 /2017	Pembangunan/Rehabilitasi/P emeliharaan Jembatan Box Culvert				53.659.000	53.659.000

Sumber: Data Olahan penulis 2019

2. Buku Besar

Setelah semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dijurnal maka selanjutnya diposting kedalam Buku Besar. Berikut contoh Buku Besar yang seharusnya diterapkan oleh Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura seperti tabel V.6 sampai V.8

Tabel V.6
Buku Besar
Tahun Anggaran

Nama Akun : Kas di Bendahara

Tangg al	Keterangan	R ef	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01/01/ 2017	Saldo awal					
12/06/ 2017	Tarik Tunai Dana Desa		354.172.200		354.172.200	
12/06/ 2017	Penyusunan APBDesa/APBDesa Perubahan			2.850.000		2.850.000
12/06/ 2017	Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan SK II			128.246.100		128.246.100
12/06/ 2017	Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Box Culvert			53.659.000		53.659.000

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Tabel V.7
Buku Besar
Tahun Anggaran 2017

Nama Akun : Pendapatan Transfer

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01/01/2017	Saldo Awal					
12/06/2017	Tarik Tunai Dana Desa		354.172.200		354.172.200	

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Tabel V.8
Buku Besar
Tahun Anggaran 2017

Nama Akun : Belanja Modal

Tangg al	Keterangan	Re f	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01/01/ 2017	Saldo awal					
12/06/ 2017	Penyusunan APBDesa/APBDesa Perubahan			2.850.000		2.850.000
12/06/ 2017	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe meliharaan Jalan SK II			128.246.100		128.246.100
12/06/ 2017	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe meliharaan Jembatan Box Culvert			53.659.000		53.659.000

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

3. Neraca Saldo

Setelah semua transaksi diposting ke dalam Buku Besar, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Neraca saldo merupakan pengelompokan saldo akhir di dalam buku besar atau daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening/perkiraan buku besar. Berikut salah contoh neraca saldo yang seharusnya diterapkan oleh Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura dapat dilihat pada tabel V.9

Tabel V.9
Neraca Saldo(sebagian)
Tahun Anggaran 2017

Tanggal	Uraian	Jumlah	
		Debit	Kredit
31/12/2017	Kas	51.446.842	1.773.943.080
	Pendapatan transfer		
	Peralatan dan mesin	536.311.120	
	Gedung dan bangunan	1.261.171.800	
	Jalan, irigasi dan instalasi	5.743.850.169	
	Belanja pegawai	339.590.000	
	Belanja barang dan jasa	66.126.084	
	Belanja modal	11.800.000	

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

4. Jurnal Penyesuaian

Langkah selanjutnya adalah penyusunan jurnal penyesuaian, tetapi Desa Buantan Besar tidak membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian perlu dibuat sebab dalam akuntansi dikenal prosedur penyesuaian. Prosedur penyesuaian dilakukan karena akuntansi didasari asumsi dasar bahwa suatu umur entitas ekonomi dapat dipenggal-penggal menjadi periode-periode yang sifatnya buatan, asumsi ini disebut juga priodisasi yang dimana kita diharuskan untuk membuat jurnal penyesuaian. Berikut beberapa transaksi dengan memerlukan jurnal penyesuaian :

a. Beban Gaji Pegawai

Pada pemerintahan Desa Buantan Besar, gaji perangkat desa dibayarkan pada awal bulan, oleh karena itu gaji perangkat desa yang sudah bekerja atau belum dibayarkan pada saat tutup buku atau akhir periode fiskal. Jumlah yang dibayarkan ini harus diakui sebagai biaya gaji yang masih berbentuk hutang.

Pada Buku Kas Umum pada tanggal 16 Mei 2017 dibayarkan penghasilan tetap dan tunjangan Tahun 2017 sebesar Rp 52.350.000. Karena gaji penghasilan

tetap dan tunjangan dibayarkan setiap awal bulan, maka desa perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode.

Jurnal akhir periode untuk aip Tanggal 31 Desember 2017 Beban Gaji Pegawai

Jurnal Finansial :

Beban gaji dan tunjangan pegawai (penghulu dan perangkat Desa)	Rp 52.350.000
Utang gaji dan tunjangan pegawai	Rp 52.350.000

Jurnal Pelaksanaan Anggaran :

No Entry

Jurnal saat dibayarkannya gaji dan tunjangan penghulu dan perangka Desa :

Beban Gaji (penghulu dan perangkat Desa)	Rp 52.350.000
Utang gaji pegawai	Rp 52.350.000
Kas	Rp 104.700.000

Jurnal Pelaksanaan Anggaran :

No Entry

b. Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor merupakan aset entitas yang dimaksudkan untuk dipakai dalam kegiatan operasional entitas sehari-hari. Alat Tulis Kantor hanya bisa digunakan sekali atau dalam waktu singkat dengan nilai satuan kecil. Desa Buntan Besar memiliki anggaran untuk belanja alat tulis kantor sebesar Rp 10.602.700 dan biaya yang terealisasi untuk belanja alat tulis kantor selama tahun

tersebut berjumlah Rp 9.037.000. Berikut ini terdapat transaksi pembelian alat tulis kantor.

27/08/2017 Pembelian Alat Tulis Kantor sebesar Rp 9.037.000

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 5) persediaan Alat Tulis Kantor bernilai 0. Berarti alat tulis kantor pada akhir periode telah habis terpakai, maka dari itu perlu dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut :

Jurnal Pembelian Alat Tulis Kantor :

Jurnal Finansial :

27/08/2017 Persediaan Alat Tulis Kantor Rp 9.037.000

 Kas di Bendahara Rp 9.037.000

Jurnal Pelaksanaan Anggaran :

27/08/2017 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 9.037.000

 Perubahan SAL Rp 9.037.000

Jurnal Penyesuaian yang harus dibuat pada Tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Jurnal Penyesuaian Beban Alat Tulis Kantor :

Jurnal Finansial :

Beban Alat Tulis Kantor Rp 9.037.000

 Alat Tulis Kantor Rp 9.037.000

Jurnal pelaksanaan Anggaran :

No Entry

5. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Setelah membuat jurnal penyesuaian, maka selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian merupakan saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan. Seharusnya Desa Buantan Besar membuat neraca saldo setelah penyesuaian seperti V.10

Tabel V.10
Neraca saldo disesuaikan
Desember 2017

Tanggal	Uraian	Jumlah	
		Debit	Kredit
31/12/2017	Kas	51.446.842	
	Peralatan dan mesin	536.311.120	
	Akumulasi penyusutan Peralatan dan mesin		107.262.224
	Gedung dan bangunan	1.261.171.800	
	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan		126.117.180
	Jalan, irigasi dan instalasi	5.743.850.169	
	Akumulasi penyusutan Jalan, irigasi, dan instalasi		287.192.509
	Pendapatan transfer		1.773.943.080
	Belanja pegawai	339.590.000	
	Belanja barang dan jasa	66.126.084	
	Belanja modal	11.800.000	

Sumber: Data Olahan Penulis

6. Aset Tetap

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau yang dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan sosial dimasa yang akan datang dapat diperoleh, baik pemerintah maupun masyarakat, juga dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset

dibagai menjadi dua bagian, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah kas yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dapat dijual dan dihabiskan dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari kas, uang muka, piutang, persediaan, dan piutang lain-lain. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, serta jaringan dan instalasi.

Aset tetap yang ada didalam laporan keuangan Desa Buantan Besar Kekayaan Milik Desa (seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan instalasi) disajikan berdasarkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP 2015 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tetap Desa Buantan Besar tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap sehingga nilai perolehan aktiva tetap tersebut tanpa dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Seharusnya Kekayaan Milik Desa harus dilakukan penyusutan terhadap aset tetap sehingga nilai aset tetap untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan instalasi yang disajikan menunjukkan nilai sebenarnya dan berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Berikut contoh aset tetap yang disusutkan :

Pada neraca, aset tetap untuk peralatan dan mesin pada tahun 2017 sebesar Rp 536.311.120, gedung dan bangunan sebesar Rp 1.261.171.800 serta jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp 5.743.850.169. umur ekonomis ditaksir 5 tahun untuk peralatan dan mesin, 10 tahun untuk gedung dan bangunan, dan 20 tahun

untuk jalan, jaringan dan instalasi. Dengan menetapkan metode garis lurus, maka dapat dihitung pertahunnya adalah sebagai berikut :

- a. Penyusutan untuk peralatan dan mesin

$$\text{Pertahun} : \text{Rp } 536.311.120 : 5 \text{ tahun} = \text{Rp } 107.262.224$$

- b. Penyusutan untuk gedung dan bangunan

$$\text{Pertahun} : \text{Rp } 1.261.171.800 : 10 \text{ tahun} = \text{Rp } 126.117.180$$

- c. Penyusutan untuk jalan, jaringan dan instalasi

$$\text{Pertahun} : \text{Rp } 5.743.850.169 : 20 \text{ tahun} = \text{Rp } 287.192.509$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka pencatatan yang seharusnya dilakukan Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura sebelum tutup buku adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan untuk perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin

$$\text{Beban Penyusutan Peralatan Mesin} \quad \text{Rp } 107.262.224$$

$$\text{Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin} \quad \text{Rp } 107.262.224$$

2. Pencatatan untuk perolehan aset tetap berupa gedung dan bangunan

$$\text{Beban penyusutan gedung dan bangunan} \quad \text{Rp } 126.117.180$$

$$\text{Akumulasi penyusutan gedung dan peralatan} \quad \text{Rp } 126.117.180$$

3. Pencatatan untuk perolehan aset tetap berupa jalan, jaringan dan instalansi

$$\text{Beban penyusutan jalan, jaringan dan instalasi} \quad \text{Rp } 287.192.509$$

$$\text{Akumulasi penyusutan jalan,jaringan dan instalasi} \quad \text{Rp } 287.192.509$$

D. Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Tahap terakhir dari siklus akuntansi adalah membuat Laporan Keuangan.

Data untuk laporan keuangan diambil dari seluruh proses akuntansi yang

dilakukan dari awal sampai akhir. Berikut bentuk dari penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Desa Buntan Besar :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan dan sisa lebih pembiayaan lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran juga menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah pusat atau daerah yang dimana menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Belanja Desa mencakup semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa akan diakui pada saat kas dikeluarkan dan didukung dengan adanya bukti yang lengkap dan bukti yang sah. Belanja desa disajikan berdasarkan kelompok bidang, kegiatan dan jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Berikut klasifikasi kelompok yang dibagi menjadi lima bagian, yaitu :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

e. Belanja tak terduga.

Maka selanjutnya klasifikasi kelompok dibagi lagi menjadi kegiatan-kegiatan yang didalamnya terdiri dari belanja menurut klasifikasi ekonomi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal).

Pembiayaan desa mencakup semua penerimaan yang perlu dibayar kemudian atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa akan diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pembiayaan akan disajikan berdasarkan kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran. Berikut ini adalah contoh format Laporan Realisasi Anggaran yang seharusnya disusun oleh Desa Buantan Besar.

Tabel V.11
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Desa Buntan Besar
Tahun Anggaran 2017

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	7.958.000	7.958.000	0
1.1.1	Hasil Usaha Desa	3.958.000	3.958.000	0
1.1.2	Hasil Aset Desa	4.000.000	4.000.000	0
1.2	Pendapatan Transfer	1.773.943.080	1.452.487.560	321.455.520
1.2.1	Dan Desa	807.919.274	807.919.274	0
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	8.363.704	8.363.704	0
1.2.3	Alokasi Dana Desa	946.460.102	627.104.582	319.355.520
1.5	Bantuan Keuangan Kabupaten	11.200.000	9.100.000	2.100.000
	JUMLAH PENDAPATAN	1.781.901.080	1.460.445.560	321.455.520
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	527.061.584	485.556.500	41.505.984
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.030.758.604	744.183.100	286.575.505
2.3	Bidang Pembinaan Masyarakat	104.564.000	79.825.000	24.739.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	123.619.774	105.037.000	18.582.774
	JUMLAH BELANJA	1.786.003.962	1.414.601.600	371.402.362
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(4.102.882)	45.843.960	(49.946.842)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	4.102.882	4.102.882	0
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.102.882	4.102.882	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	4.102.882	4.102.882	0
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0	49.946.842	(49.946.842)

Sumber : Desa Buntan Besar

2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan kekayaan menyajikan kekayaan milik desa yang mana pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai tanggal 31 Desember 2017 satu tahun. Laporan Kekayaan Milik Desa dibagi menjadi tiga akun pokok yaitu aset desa, kewajiban, dan kekayaan bersih. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli, atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset dibagi dua berdasarkan tingkat likuiditasnya yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset Lancar merupakan aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun. Contoh dari aset lancar antara lain adalah kas, piutang, dan persediaan. Sedangkan Aset Tidak Lancar merupakan jenis aset yang diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu tahun. Contoh dari aset tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan instalansi. Kewajiban merupakan utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh pemerintah desa. Kekayaan bersih, adalah selisih antara aset dan kewajiban. Pada Desa Buntan Besar akun-akun yang telah disajikan pada kekayaan milik desa tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran. Seharusnya nilai akun persediaan pada laporan kekayaan milik desa tidak bernilai 0, hal ini dapat menyebabkan persediaan menjadi rendah yang juga dapat mempengaruhi aset lancar yang akan menjadi terlalu kecil, dampaknya laporan keuangan desa buntan besar dinilai tidak wajar.

Tabel V.12
Laporan Kekayaan Milik Desa
Anggaran 2017

URAIAN	TAHUN 2017 (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N (Tahun Sebelumnya)
1. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
01. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa	51.446.842	4.102.882
02. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
03. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR	51.446.842	4.102.882
B. ASET TIDAK LANCAR		
01. Investasi Permanen		
- Pernyataan Modal Pemerintahan Kampung		
02. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin	536.311.120	524.511.120
- Akm penyusutan peralatan dan mesin	(107.262.224)	
- Gedung dan Bangunan	1.261.171.800	1.261.171.800
- Akm penyusutan Gedung dan Bangunan	(126.117.180)	
- Jalan, Jaringan dan Instalansi	5.743.850.169	5.064.243.469
- Akm penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalansi	(287.192.509)	
03. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
04. Aset Tidak Lancar Lainnya		
JUMLAH TIDAK LANCAR	7.020.761.176	8.555.926.389
JUMLAH ASET (A+B)	7.072.208.018	8.560.029.271
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)	7.072.208.018	8.560.029.271

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.
2. Dalam penerepan penerimaan dan pengeluaran kas pada Desa Buantan Besar belum melakukan pemisahan pencatatan antara penerimaan dan pengeluaran.
3. Desa Buantan Besar tidak melakukan pencatatan terhadap jurnal penyesuaian beban gaji dan bahan habis pakai. Jurnal penyesuaian sangat perlu dibuat sebab dalam akuntansi dikenal prosedur penyesuaian.
4. Pada akhir tahun Desa Buantan Besar tidak membuat jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan pada Laporan Kekayaan Milik Desa belum melakukan penyusutan terhadap aset tetap.
5. Penerapan akuntansi pada Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura belum sepenuhnya melakukan prinsip akuntansi sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

B. Saran

1. Sebaiknya Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura harus membuat pemisahan pencatatan antara penerimaan dan pengeluaran agar lebih akurat.
2. Sebaiknya Desa Buantan Besar membuat pencatatan jurnal penyesuaian, sebab jurnal penyesuaian sangat berguna dalam memperbarui saldo akun pada akhir periode yang bertujuan untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun rill ataupun akun nominal agar bisa menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.
3. Sebaiknya Desa Buantan Besar melakukan penyusutan terhadap aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa agar Laporan Keuangan yang disajikan dapat lebih akurat dan tidak terjadi salah saji informasi.
4. Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura sebaiknya setiap akhir tahun harus membuat jurnal umum baik, jurnal penerimaan kas maupun pengeluaran kas, buku besar, neraca saldo, dan melakukan penyusutan terhadap aset tetap sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.
5. Sebaiknya Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam mengelola Laporan Keuangan berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- David Wijaya.2018. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Hans Kartikahadi, dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK berbasis IFRS. Makassar: Penerbit Salemba Empat.
- Harahap,Sofyan Syafri.2015. Teori Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jarot Tri Bowo Santoso. 2013. Pengantar Akuntansi. Surabaya: Jengala Pustaka Utama.
- Rohman, Abdul, dkk. 2018. Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sujarweni V.W, 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni V.W, 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wahjudin Sumpeno.2011.Perencanaan Desa Terpadu.Banda Aceh: Read Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2016. Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun.
- Undang Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2014.